

WIDYA AKSARA

Jurnal Agama Hindu

Volume 25 Nomor 2 September 2020

KINERJA PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS DITINJAU DARI FUNGSI PENYULUH DI MASA PANDEMI COVID- 19

PERFORMANCE OF NON-PNS HINDU RELIGIOUS COUNCILS ADJUSTED FROM THE FUNCTION OF COUNSELERS IN THE PANDEMIC TIME COVID-19

Oleh

Sugiman, I Nyoman Santiawan

Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah

sugimansth@gmail.com, inyomansantiawan@gmail.com

Abstrak

Penyuluh Agama Hindu merupakan ujung tombak pembinaan umat Hindu disetiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh agama Hindu Non PNS Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari fungsi penyuluh agama di masa pandemic Covid- 19. Metode penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan obeservasi dan wawsncara lansung dengan pihak pihak yang terkait seperti tokoh umat, penyuluh, bimas Hindu DIY dan beberapa umat sekitar DIY. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 3 tahap, yang pertama reduksi data, penyajian data kemudian disimpulkan dan diverifikasi untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan dan tingkat akurat yang tinggi. Kreteria/ Indikator fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kinerja Penyuluh Agama Hindu ada 4 kreteria yang akan dinilai,1. Fungsi Informatif, 2. Fungsi Edukatif, 3. Fungsi Konsultatif dan 4. Fungsi Advikatif. Dari keempat kreteria tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluh mampu menjalankan fungsinya walaupun dalam kondisi pandemic covid-19. Hasil penelitian dari keempat fungsi tersebut adalah: 1. Penyuluh berberan aktif dalam menyapaikan informasi terkait peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan Covid- 19. 2. Penyuluh mampu menjalankan tugasnya fungsi edukatif dengan melakukan penyuluhan/ pembinaan daring, membuat koneten tulisan, membuat video pendek yang disebar di social media. 3. Penyuluh menjadi garda terdepan dalam menerapkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan ibadah dirumah ibadah sesuai peraturan pemerintah. 4. Penyuluh memberikan pendampingan kepada umat yang terdampak Covid-19 yang bagi beberapa warga yang menerima tuduhan terpapar Covid-19. Dari hasil tersebut kesimpulan penelitian ini adalah Penyuluh Agama Hindu Non PNS mampu melaksanakan kinerja dengan baik dan sesuai fungsinya walaupun di masa pandemi Covid-19. Bahkan para penyuluh memiliki peran yang sangat besar dalam penanggulangan Covid- 19 dengan menjadi rewalan untuk mendata, memverifikasi dan mendistribusikan bantuan untuk umat Hindu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci :Kinerja, Fungsi, Penyuluh Agama Hindu dan Covid-19.

ABSTRACT

The instructor Hindu Religion is the spearhead of the formation of Hindus in every region. This study aims to determine the performance of non-PNS Hindu religious instructors in the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta in terms of the function of religious

extension agents during the Covid-19 pandemic. This research method uses data collection methods with observation and direct interview with related parties such as community leaders, extension workers. , DIY Hindu bimas and some devotees around DIY. Data processing in this study uses 3 stages, the first is data reduction, data presentation and then conclusions and verification to obtain data that is truly relevant and a high level of accuracy. The criteria / function indicators that will be used to determine the performance of Hindu Religious Instructors are 4 criteria that will be assessed, 1. Informative Functions, 2. Educative Functions, 3. Consultative Functions and 4. Advocative Functions. Of the four criteria, the results of this study indicate that extension workers are able to carry out their functions even in the Covid-19 pandemic conditions. The results of the research on these four functions are: 1. Extension officers are active in delivering information related to government regulations related to Covid-19 response. 2. Extension officers are able to carry out their educational duties by conducting online counseling / coaching, making written content, making short videos that spread on social media. 3. Extension officers are at the forefront of implementing government regulations for the implementation of worship in houses of worship according to government regulations. 4. Extension officers provide assistance to people affected by Covid-19 for some residents who have received accusations of being exposed to Covid-19. From these results, the conclusion of this study is that the Non-PNS Hindu Religious Instructors are able to perform well and according to their function even during the Covid-19 pandemic. Even the extension workers had a very big role in the response to Covid-19 by being a rewall to record, verify and distribute aid to Hindus in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: Performance, Function, Hindu Religion and Covid-19 Extension.

I. PENDAHULUAN

Kinerja menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil kerja atau program yang sudah disepakati. Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi diatas kinerja lebih ditekankan pada tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan. Kinerja dianggap penting bagi organisasi, karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Hamzah, 2018). Prawirosentono mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan Cormick dan Tiffin dalam Sutrisno (2011) mengemukakan kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Menurut Stephen P. Robbin dalam Rai (2008) kinerja merupakan hasil evaluasi kerja yang telah dilakukan dibanding dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Kerja yang dilakukan seharusnya tidak ada unsur paksaan dan dilakukan dengan semangat yang tinggi. Indikator dalam mengukur suatu kinerja dapat

dilakukan berbagai cara, menurut Mangkunegara (2007:67) untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan memakai empat indikator yaitu: Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab.

Dalam kitab suci Hindu, banyak sekali sloka/matra yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya setiap umat dalam melaksanakan swadharma/ kewajiban dalam bekerja. Dalam Bhagawad Gita disebutkan:

*Tasmad asaktah satatam
karyam karma samacara
asakto hy acaran karma
param apnoti purusah*

Bhagawad Gita III.19

Artinya :

Oleh karena itu laksanakan segala kerja Sebagai kewajiban tanpa terikat (pada akibatnya), Sebab kerja yang bebas dari keterikatan bila melakukan pekerjaan itu orang itu akan mencapai (tujuan) yang tertinggi.

Pada sloka Bhagawa Gita di atas bisa disimpulkan bahwa setiap orang harus melaksanakan kerja tanpa paksaan dan keterikatan, karena apabila itu dilakukan dengan ikhlas dan semangat tinggi akan mencapai tujuan yang tertinggi. Dalam organisasi, masing-masing bidang mempunyai tugas yang berbeda, sehingga untuk menuju tujuan bersama maka semua bidang harus bisa bekerja sama dalam mencapai visi organisasi.

Penyuluh Agama merupakan kepanjangan tangan kementerian agama dalam memberikan pembinaan kepada umat. Jika di dalam KMA Nomor 79 Tahun 1985 Penyuluh Agama merupakan Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama Hindu merupakan petugas yang diangkat Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan umat dengan bahasa agama untuk mencapai visi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Adapun aturan yang mengatur tentang Penyuluh Agama Non PNS adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No 79 Tahun 1985 Tentang Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 150 Tahun 2011 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 148 Tahun 2014 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 776 Tahun 2016 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengangkatan, Penetapan dan Pemberhentian Penyuluh Agama Hindu Non PNS.

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS di putuskan bahwa honor naik menjadi Rp. 1.000.000 perbulan. Dengan kenaikan honor tersebut maka diharapkan kinerja penyuluh Agama Non PNS dapat meningkat dan memberikan hasil yang baik dari sebelumnya. Sejak diberlakukannya keputusan itu, maka berbagai pedoman telah dibuat, mulai dari mekanisme pengangkatan dan tugas dan kewajiban penyuluh yang diberlakukan minimal melakukan

penyuluhan dalam satu minggu sejumlah 2 kali atau 8 kali dalam sebulan. Tugas dan kewajiban Penyuluh Agama Non PNS sudah hampir sama dengan tugas dan kewajiban penyuluh Agama PNS. Dalam beberapa tahun kedepan akan dilakukannya inpassing bagi penyuluh Agama Non PNS sehingga setelah diinpassing maka pengasilan bagi penyuluh Agama Non PNS akan sama dengan penyuluh Agama PNS.

Hasil Observasi di Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, data penyuluh Agama Non PNS tahun 2020 ada 30 penyuluh dengan rincian sebagai berikut: yang bertugas untuk wilayah DIY 3 Penyuluh, di Kabupaten Sleman 6 Penyuluh, di Kabupaten Bantul ada 5 Penyuluh, di Kota Yogyakarta ada 3 Penyuluh, di Kabupaten Gunungkidul ada 12 Penyuluh dan di Kabupaten Kulonprogo ada 1 penyuluh.

Dengan 30 penyuluh Agama Hindu Non PNS Pembimas Hindu Kanwil Kemenag DIY sangat terbantu dalam memberikan pembinaan umat maupun menjalankan program yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan dan menempatkan wilayah tugas Pembimas Hindu Kanwil Kemenag DIY memiliki kebijakan tersendiri yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyuluh Agama Hindu yang diangkat sehingga dalam melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan umat yang dibina.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data <https://kependudukan.jogjapro.go.id/> jumlah total umat Hindu 3.599 jiwa dengan rincian di Kota Yogyakarta terdapat 515 jiwa, Kabupaten Sleman 1.158 jiwa, Kabupaten Gunungkidul, 1.140 jiwa, Kabupaten Bantul 761 jiwa dan Kabupaten Kulonprogo 25 jiwa. Data tersebut adalah data yang tercatat di kependudukan DIY, tetapi jumlah data yang tidak tercatat juga sangat banyak, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di perguruan tinggi dan sekolah terdapat sekitar 2.000 jiwa yang berdomisili sementara di DIY yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan pegawai karena tugas kerja. Jadi jika ditotal keseluruhan umat Hindu yang ada di DIY tahun 2020 adalah sejumlah kurang lebih, 5.599 jiwa. Angka yang tidak sedikit, mengingat DIY sendiri dikenal dengan kota pendidikan tempat bagi para intelektual, sehingga semua umat harus bisa dibina dengan baik. Sebutan lain DIY adalah miniatur Indonesia, di DIY mudah sekali ditemui orang dari seluruh Indonesia, sehingga ini yang menjadi tugas penting Penyuluh Agama Hindu Non PNS dalam melakukan pembinaan kepada umat yang heterogen terutama kaum pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa ini akan menjadi teladan pada saat selesai menyelesaikan pendidikan dan pulang ke daerah masing-masing, dan diharapkan mampu memberikan menyampaikan kesan yang baik kepada warga di tempat asal. Inilah yang menjadi titik penting penelitian ini dilakukan dan juga pembinaan merupakan yang saat ini metode pembinaan umat yang saat ini dilakukan pada pertemuan-pertemuan keumatan baik yang berskala besar maupun skala kecil, mulai dari kumpulan arisan kumpulan banjar, asram, pasraman sampai kegiatan upacara keagamaan yang besar (Santiawan, 2019)

Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat Covid-19. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun, diketahui sebelumnya menghadiri seminar di kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020.

Di minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan sembuh. Kedua pasien yang resmi dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan rumah sakit pada 13 Maret 2020 itu adalah kesembuhan pertama kali pengidap Covid-19 di Indonesia. Pasien 02 yang berusia lanjut, yakni 64 tahun, juga berhasil mengatasi Covid-19. Sebulan lebih sesudah masuknya Covid-19 ke Indonesia, untuk pertama kalinya tercatat angka kesembuhan pengidap covid-19 lebih besar dari jumlah penduduk yang meninggal karena virus tersebut. Tanggal 16 April 2020, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan 548 pasien yang sembuh, sedangkan jumlah pasien meninggal 496 orang. Namun, data kesembuhan pasien Covid-19 yang melampaui angka pasien meninggal bukanlah tanda bahwa wabah virus ini akan segera teratasi di Indonesia. Sejauh ini, angka kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Baru sebulan lebih sejak dinyatakan resmi muncul jumlah kasus pengidap virus korona di Indonesia mencapai di atas 5.500 kasus. <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>

Hingga Senin (31/8/2020) petang. Pemerintah melalui kementerian kesehatan dan BNPB merilis data sebaran peta penyebaran virus corona. Data terakhir yang dilansir dari BPNB menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 174.796 pasien. DI Yogyakarta Kasus Baru: 28 orang, Sembuh: 1.026 orang, Meninggal Dunia: 39 orang, Terkonfirmasi: 1.425 orang. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga diri supaya terhindar dan tidak terpapar Covid-19. Seluruh kegiatan masyarakatpun dibatasi dan diatur untuk menekan dan memutus rantai penyebaran Covid-19 ini termasuk kehidupan beragama juga ikut terkena dampak akibat pandemi Covid-19 ini. Himbauan untuk melakukan ibadah di rumah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat beragama. Kegiatan ibadah di rumah ibadah dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Perubahan kehidupan beragama menjadi tantangan tersendiri kepada para penyuluh untuk melakukan tugasnya dengan baik. Penyuluh Agama Hindu Non PNS di Yogyakarta biasanya melaksanakan tugasnya yang banyak bertatap muka dengan umat dengan adanya Covid-19 ini menjadi terhabat untuk melakukan tatap muka dengan umat. Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS DI Tinjau Dari Fungsi Penyuluh Di Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan Yogyakarta untuk Penyuluh Agama Hindu NON PNS, pengambilan data dengan cara observasi, pengamatan, dokumentasi dan wawancara, yang merupakan sumber data yang utama, sedangkan cara analisis datanya yaitu dengan mengamati, memahami, dan menafsirkan setiap fakta atau data yang telah dikumpulkan serta hubungan di antara fakta (Moleong, 2013). Data penelitian yang peneliti peroleh melalui observasi dan wawancara dengan informan selama penelitian di lapangan selanjutnya di paparkan, kemudian dicari pokok-pokok penting yang terkandung di dalamnya sehingga

dapat di ketahui dengan jelas maknanya. Data yang peneliti peroleh selanjutnya diseleksi dan di kode untuk memperoleh konsep yang lebih sederhana sehingga relatif lebih mudah dipahami (I Nyoman Santiawan, 2020)

III. PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyuluhan agama dalam arti yang luas, yaitu pembimbingan dan penerangan di bidang agama Hindu;
2. Memberikan teladan kepada umat Hindu melalui tindakan, ucapan dan pikiran;
3. Sebagai perpanjangan tangan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama dalam menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama;
4. Mengembangkan berbagai metode, materi dan media penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kakanwil Kemenag Provinsi.

Adapun fungsi Penyuluh Agama Hindu Non PNS Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Informatif, yaitu sebagai tempat untuk memperoleh informasi tentang visi, misi, program dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama serta isu-isu aktual berkenaan dengan kehidupan keagamaan;
2. Edukatif, yaitu sebagai soko guru yang mendidik umat sesuai dengan kitab suci Weda dan Susastera Weda lainnya;
3. Konsultatif, yaitu sebagai tempat bertanya dan mengadu bagi umat dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah, khususnya masalah keagamaan;
4. Advokatif, yaitu memberikan pembelaan kepada kelompok sasarannya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal.

(<http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/01/apa-ya-tugas-dan-fungsi-penyuluh-agama.html> diakses, 27 Maret 2020 Pukul 15.00

B. Kinerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS Ditinjau Dari Fungsi Penyuluh Agama di Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Fungsi Informatif

Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta aktif menyampaikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi pandemic Covid-19 seperti himbauan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Wawancara dengan salah satu penyuluh menyampaikan, penyuluh aktif memberikan informasi tentang Surat

Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Mulai dari menyampaikan informasi sampai penerapan protocol kesehatan dan tata tertib penyelenggaraan ibadah di Rumah Ibadah penyuluh mendampingi dan membantu mengkonsep dan menghimbau kepada umat yang akan hadir sembahyang ke pura. Selain itu Mujirah menyampaikan pentingnya peran penyuluh di masa pandemic untuk menyampaik informasi yang berkaitan dengan peraturan/kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemic covid- 19 ini dikarenakan ada banyak umat yang belum bisa mengikuti/ mengetahui peraturan-peraturan pemerintah sehingga disinilah petingnya penyuluh hadir untuk menyampaikan ke umat (Wawancara dengan Mujirah, Fungsi penyuluh sebagai informative 3 Agustus 2020).



Gambar1. Penyuluh menyampaikan SE Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 ke umat

2. Fungsi Edukatif

Semangat Penyuluh Agama Hindu Non PNS untuk menjalankan tugas dengan baik memang tidak terhalang oleh kondisi Pandemi covid- 19 dan terbentur dengan kebijakan pemerintah. Dilarang berkumpul membuat banyak pertemuan keumatan dipending/ ditiadakan sehingga kesempatan penyuluh untuk melaksanakan pembinaan tertunda. Kondisi demikian tidak memutuskan ide untuk tetap bisa melaksanakan pembinaan kepada kelompok binaannya. Hal yang dilakukan oleh Penyuluh adalah dengan cara melakukan pembinaan secara daring yaitu dengan membuat tulisan-tulisan dan video pendek tentang ajaran agama yang kemudian di sebar diberbagai media social. Hal ini menjadi jalan keluar bagi penyuluh agama Hindu tetap bisa melakukan pembinaan yang akan dijadikan bahan laporan. Wawancara dengan Baskara, Semenjak pandemic ini memang gerak sangat dibatasi, ini menjadi tantangan tersendiri bagi yang bertugas sebagai penyuluh agama Hindu untuk tetap bisa melakukan penyuluhan. Atas arahan dan dukungan dari teman-teman nya Baskara mampu menyesuaikan model pembinaan yaitu dengan cara membuat konten video pendek yang berisi pesan ajaran dharma/agama yang

di upload ke social media kemudian bisa dikonsumsi oleh umat bahkan dunia. (Wawancara dengan Baskara, Penyuluh Agama Hindu, 13 Agustus 2020).



Gambar 2. Pembuatan konten Video Pendek berisi ajaran dharma

3. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Hindu Non PNS menerima konsultasi dengan kejadian pandemi Covid-19 ini, mulai dari bertanya, mengadu sampai membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh salah satu umat Hindu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lotama salah satu Penyuluh Agama Hindu Non PNS menyampaikan, kejadian-kejadian yang dihadapi umat sangatlah kompleks, ada yang di PHK, Dirumahkan, bahkan kehilangan pekerjaan, disaat itulah penyuluh Hindu No PNS hadir untuk menyerap keluhan umat dan membantu memecahkan masalah itu. Penyuluh Hindu bergabung dengan panitia tanggap darurat covid-19 PHDI DIY, banyak hal yang bisa dilakukan oleh penyuluh, mulai dari mendata, memverifikasi dan pendistribusian bantuan untuk umat yang terdampak Covid-19 (Wawancara dengan Lotama, Penyuluh Agama Hindu, Fungsi konsultatif, 5 Agustus 2020).



Gambar 3. Penyuluh Agama Hindu melakukan konsultatif untuk menanggulangi umat terdampak Covid-19

4. Fungsi Advokatif

Masa Pandemi Covid-19 ini banyak membuat umat merasa resah dengan berita –berita atau tuduhan-tuduhan yang mengarah pada Covid-19. Terjadi salah satu umat yang diduga oleh warga sekitar tertapar covid-19 yang mendapat perlakuan yang diskriminasi oleh sekitar warga. Sehingga umat tersebut merasa trauma atas kejadian itu. Penyuluh Hindu Non PNS dalam hal ini membantu membela dengan cara melakukan prosedur-prosedur yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak terpapar Covid-19. Hasil wawancara dengan Neso salah satu anggota penyuluh agama Hindu Non PNS Daerah istimewa Yogyakarta menyampaika penyuluh harus selalu ada untuk umat, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pada masa pandemic ini penyuluh berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa melayani. Kejadian yang dialami oleh salah satu umat merupakan

pengalaman berharga untuk kita semua bahwa semua memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Dengan diberikan pendampingan, umat bisa terbantu dalam menghadapi masalah. Pendampingan dilakukan dengan cara daring, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Wawancara dengan Neso, Penyuluh Agama Hindu, 24 Agustus 2020).

Dari keempat fungsi penyuluh agama Hindu Non PNS di Daerah Istimewa Yogyakarta secara spesifik memiliki peran yang masing-masing saling berkaitan selama terjadi Covid-19 ini. Sehingga, dengan berjalannya Fungsi Penyuluh dengan baik itu berarti kehadiran penyuluh sangat diperlukan disaat masyarakat sedang mengalami pandemic ini. Penyuluh Agama Hindu Non PNS di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pelayanan yang baik selama pandemic Covid-19, sebagai umat dapat merasakan kehadiran Penyuluh Agama yang terjun langsung memberikan bantuan, tidak hanya itu, penyuluh juga sigap dengan melakukan pendampingan dalam mengisi sensus penduduk online sehingga sangat dirasakan kehadirannya di saat pandemic Covid-19 ini (Wawancara dengan Wirta, Umat Hindu DIY, 30 Agustus 2020).

IV. KESIMPULAN

Penyuluh Agama Hindu Non PNS mampu melaksanakan kinerja dengan baik dan sesuai fungsinya walaupun di masa pandemi Covid-19. Bahkan para penyuluh memiliki peran yang sangat besar dalam penanggulangan Covid-19 dengan menjadi rewalan untuk mendata, memverifikasi dan mendistribusikan bantuan untuk umat Hindu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kesimpulan yang berkaitan dengan fungsi penyuluh agama:

1. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam menyampaikan informasi baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah ataupun perilaku kegidupan beragama pada masa pandemic Covid-19.
2. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal sebagai fungsi edukatif, yaitu dengan cara melakukan pembinaan dengan cara daring, membuat tulisan dan konten video pendek yang berisi ajaran agama kemudian disebar melalui media social.
3. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif ikut menanggulangi umat yang terdampak Covid-19 dengan cara selalu berkonsultasi baik dengan panitia Posko maupun umat untuk pendataan, verifikasi dan pendistribusian bantuan.
4. Penyuluh Agama Hindu Non PNS Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi agen untuk memberikan perlindungan bagi umat yang terduga covid-19 dan menjadi pembela dari perilaku-prilaku yang membuat ketidakharmisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzah, Ali.2018."Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama" dalam Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 18, No. 02(hal. 37-48). Jambi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Bernardin, H. John and Joyce EA Russel. 1998. Human Resource Management: An Experiential Approach. Boston: McGraw-Hill.

- Budiono. 2005. Kamus Ilmiah Populer Internasional. Surabaya : Airlangga University Press
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Airlangga University Press
- Handayani, Iin. 2011 “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Alauddin, Makasar.
- I Nyoman Santiawan, I. N. W. (2020). UPAYA PASRAMAN PADMA BHUANA SARASWATI DALAM MEWUJUDKAN SISYAYANG CERDAS BERBUDAYA. *Bawi Ayah*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/ba.v11i1.455>
- Iqbal, H. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Gihalva Indonesia.
- Kurniati, Poni S & Fidowaty, Tatik. 2017 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penelitian Dosen Universitas Komputer Indonesia” dalam JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol 7 No. 2 (hal 191-201) Bandung, Universitas Komputer Indonesia
- Mangkunegara, Anwar P. 2007. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mukajir, 1990. Studi Kepustakaan, Jakarta : Airlangga
- Nuryani, Y. R. 2006. Penilaian Otentik (Authentic Assessment). FPMIPA UPI.
- Patmarina, Hepiana & Cahya, Riksi U. 2017 “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mandala Lintas Nusa (Nusa Net) Di Bandar Lampung” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Pemerintah Indonesia. 1985. Keputusan Menteri Agama No 79 Tahun 1985 Tentang Penyuluh Agama Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
- Pemerintah Indonesia, 2007. Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Pemerintah Indonesia, 2011. Keputusan Menteri Agama No. 150 Tahun 2011 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
- Pemerintah Indonesia, 2014. Keputusan Menteri Agama No. 148 Tahun 2014 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
- Pemerintah Indonesia, 2016. Keputusan Menteri Agama No. 776 Tahun 2016 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
- Pemerintah Indonesia, 2019. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI

- Pemerintah Indonesia, 2019. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengangkatan, Penetapan dan Pemberhentian Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Jakarta. Kementerian Agama RI
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Rai, IGA. 2008. Audit kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Simanjuntak. 2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- I Nyoman Santiawan, I. N. W. (2020). UPAYA PASRAMAN PADMA BHUANA SARASWATI DALAM MEWUJUDKAN SISYAYANG CERDAS BERBUDAYA. *Bawi Ayah*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/ba.v11i1.455>
- Santiawan, I. (2019). Persembahyangan Purnama Dan Tilem Sebagai Moment Strategis Untuk Peningkatan Sraddha Bhakti Serta Pembinaan Umat Yogyakarta. *Widya Aksara*, 23(2), 1–14. <http://ejournal.sthd-jateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/view/36/28>
- Soehardi, Sigit, 2001. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen, Yogyakarta : BPFE UST
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfa Beta
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV. Alfa Beta
- Suhardi, Untung. 2018 “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Hindu” Studi Kasus Pembinaan Umat Hindu Di DKI jakarta” dalam Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. 9, No. 2 (hal 16-25) Denpasar, Universitas Hindu
- Sutrisno, Edi . 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana
- Widodo, Joko. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedai Publishing.
- Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba empat.

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/> diakses pada 20 Maret 2020

<http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/01/apa-ya-tugas-dan-fungsi-penyuluh-agama.html> diakses, 27 Maret 2020 Pukul 15.00

<http://adhityanawindusiwi.blogspot.com/2013/07/penyuluhan-agama-hindu-oleh-adhityana.html> diakses, 27 Maret 2020 Pukul 15.30